

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/183/Kep/413.013/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/ 57/Kep/413.013/2017 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN KOMODITAS JAGUNG DAN DEMFARM JAGUNG KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan terhadap pengembangan kawasan komoditas jagung dan *Demfarm* Jagung Kabupaten Lamongan Tahun 2017, perlu menyusun kembali Keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Jagung Kabupaten Lamongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja pengembangan kawasan jagung Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/57/Kep/413.013/2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/ Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/ Permentan/KB.400/2/2016 tentang Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/ Permentan/RC.400/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
- 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/ Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
- 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 830/Kpts/ RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
- 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 seri D);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan

Nomor: 188/57/Kep/413.013/2017, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tersebut dalam

lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 28 Agustus 2017

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya Pit.Kepala Bagian Hukum,

(*<u>M. DWI KORIANTO</u> NIP. 19650106 199203 1 014

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor :188/ /Kep/413.013/2017 Tanggal : 28 Agustus 2017_____

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN JAGUNG KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua Harian I Ketua Harian II	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
	Ketua Harian n	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
	Sekretaris II	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Kelompok Kerja :	
	a. Perencanaan - Koordinator - Anggota	Prof. (R) Dr. Moh. Cholil Mahfud 1. Ir. Sidi Asmoro 2. Dr. Achmad Rachman 3. H. Sholahuddin 4. Ir. Winarno Tohir
	b. Budidaya	
The state of the s	- Koordinator I	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
	- Koordinator II	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
	- Anggota	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
	c. Pemberdayaan Kelembagaan	·
	- Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	- Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Penyuluhan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
	d. Pemasaran	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
5 5 5 5 5	e. Kerjasama dan Kemitraan	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
	f. Pembiayaan	Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Saurida sesuai dengan aslinya Plt.Kepala Bagian Hukum,

DIMI MODIANTO

(<u>M. DWI KORIANTO</u> NIP. 19650106 199203 1 014